

KETERKAITAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN ASPEK INFRASTRUKTUR NON FISIK

Oleh : Sorni Paskah Daeli

ABSTRAK

Studi ini bertujuan memberikan gambaran keterkaitan infrastruktur non fisik terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, dibutuhkan data sekunder BPS tahun 2007. Analisisnya menggunakan teknik analisis data sekunder yang bersifat kuantitatif menggunakan model regresi dalam bentuk cross-section. Hasilnya menunjukkan keterkaitan aspek infrastruktur non fisik terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, seperti: pendapatan per kapita per tahun, angka melek huruf dan kepadatan penduduk. Studi ini menyarankan kepada pemerintah agar meningkatkan kemampuan dalam penyediaan infrastruktur non fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang diperlukan bagi pemberdayaan SDM. Juga disarankan, agar pemerintah secara bertahap memindahkan konsentrasi industri di wilayah luar Jawa dengan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, agar populasi penduduk tidak hanya terfokus di pulau jawa tetapi tersebar merata di pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Kata Kunci: infrastruktur non fisik, pertumbuhan ekonomi wilayah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi nasional. Banyak isu peningkatan pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Isu-isu itu terutama mengenai kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah banyak dipengaruhi perbedaan faktor endowment, sumber daya manusia, wilayah geografis, dan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur memiliki arti penting dalam pembangunan daerah, karena akan meningkatkan hubungan produsen dengan pasar, meningkatkan kualitas pembangunan manusia, dan menjaga kesinambungan siklus bisnis. Artinya, bahwa sarana infrastruktur yang memadai akan menjadi landasan bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peranan infrastruktur dalam pembangunan telah banyak dikaji oleh para ahli ekonomi, termasuk keterkaitan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi (Estache, 2004). Sebagian besar literatur itu merupakan hasil dari pengembangan konsep dan teknik pembangunan yang berhubungan dengan *new growth theory* (de la Fuente, 2002). Infrastruktur yang memadai akan menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi dan pelayanan di bidang ekonomi kepada masyarakat. Kualitas dan efisiensi dari pelayanan infrastruktur mempengaruhi keberlanjutan aktivitas bisnis dan ekonomi secara umum. Permintaan pelayanan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik sebagai bentuk dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat (Hudson, et.al., 1997).

Aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur dapat mendukung kegiatan perekonomian, sehingga kesenjangan ketersediaan infrastruktur dapat juga menyebabkan kes-

enjangan pembangunan antar daerah. Infrastruktur fisik seperti transportasi darat yang memadai dapat membuka akses bagi wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Di sisi lain, infrastruktur non fisik memiliki peranan penting dalam pemberdayaan. Masyarakat yang berdaya dapat meningkatkan pengetahuan dan membangun keahlian melalui pendidikan yang lebih baik (Briceno, et.al., 2004).

1.2. Perumusan Masalah

Pembangunan di Indonesia selama ini masih mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik, sehingga infrastruktur non fisik seringkali luput dari perhatian. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membuka wawasan bagaimana pengaruh infrastruktur non fisik dalam pembangunan ekonomi.

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur non fisik dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Hal itu untuk membuka wawasan mengenai pentingnya penyediaan fasilitas infrastruktur non fisik yang memadai bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1.4. Metode Penulisan

Tulisan ini bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan peranan infrastruktur non fisik dalam pembangunan ekonomi daerah. Analisis data kuantitatif menggunakan alat-alat pengujian statistik dengan menggunakan spesifik model ekonometrik. Data yang dibutuhkan diperoleh dari data publikasi BPS.

1.5. Teknik Analisis

Tulisan ini menggunakan teknik analisis data sekunder yang bersifat kuantitatif menggunakan model regresi dalam bentuk analisis cross-section dengan periode analisis tahun 2007. Model ekonometrik didasarkan pada hasil studi Demurger (2001) yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis, sehingga bentuknya menjadi:

$$G_i = \alpha_i + \beta_1 \ln(Y_{it-1}) + \beta_2 \ln X_i + u_i \dots (1)$$

Notasi G merupakan pertumbuhan

PDRB riil per kapita, Y menunjukkan tingkat PDRB riil per kapita, X merupakan variabel-variabel infrastruktur non fisik yang diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian dalam faktor akumulasi modal.

Model (1) tersebut kemudian disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan diterapkan dalam model analisis cross-section menggunakan data provinsi di Indonesia pada tahun 2006, sehingga diperoleh model persamaan regresi:

$$G_{\gamma} = \alpha_i + \beta_1 Y_{\gamma} + \beta_2 ASW_{\gamma} + \beta_3 AMH_{\gamma} + \beta_4 KPP_{\gamma} + u_{\gamma} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana G menunjukkan pertumbuhan rata-rata riil PDRB per capita, Y menunjukkan tingkat PDRB riil per kapita tahun sebelumnya (2006), ASW adalah ukuran menunjukkan persentase rumah tangga dengan akses ke air bersih, AMH adalah angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, KPP adalah tingkat kepadatan penduduk dan u adalah error term, serta γ menunjukkan wilayah provinsi.

Standar prosedur untuk tes statistik dari model akan dihitung dengan menggunakan standar asumsi klasik regresi. Prosedur untuk melakukan uji t-test dilakukan melalui (Pindyck and Rubinfeld, 1998):

$$H_0 : \beta = 0 \text{ dan } H_1 : \beta \neq 0$$

Jika t-hitung > t-tabel pada tingkat kepercayaan 95%, maka H_0 ditolak dan berarti ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Uji F-test juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keyakinan bahwa dependen variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi model secara statistic melalui prosedur (Pindyck and Rubinfeld, 1998):

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0 \text{ dan}$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

Jika F-hitung > F-tabel pada tingkat kepercayaan 95%, maka H_0 ditolak, sehingga H_1 diterima. Dengan demikian berarti semua variabel independen yang digunakan dalam model secara bersama-sama mampu mempengaruhi variasi dari variabel dependen. Selanjutnya, diagnosa tes dari analisis regresi didiskusikan sebelum melakukan interpretasi hasil dari estimasi model. Uji asumsi klasik

untuk heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui uji White-test untuk heteroskedastisitas. Sementara itu, uji asumsi klasik untuk multikolinearitas dapat diduga apabila terdapat relatif R^2 yang tinggi tetapi hanya terdapat sedikit variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dan adanya korelasi antar variabel independen (Pindyck dan Rubinfeld, 1998).

1.6. Ruang Lingkup

Model analisis peranan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi daerah ini hanya akan memfokuskan pada peranan infrastruktur non fisik. Pemahaman infrastruktur non fisik ini mengacu pada definisi infrastruktur inti dari World Bank (1994). Definisi infrastruktur non fisik dapat dijelaskan sebagai ketersediaan sarana dan fasilitas infrastruktur non fisik bagi pemenuhan kebutuhan publik yang mendukung keberlangsungan pembangunan.

Infrastruktur non fisik dalam penulisan ini menggunakan variabel-variabel terukur sebagai proxy dari infrastruktur non fisik, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang diwakili oleh variabel persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih dan angka melek huruf. Alasan penggunaan variabel pendidikan dan pelayanan kesehatan karena kedua indikator infrastruktur non fisik tersebut dapat menentukan tingkat kualitas dan produktivitas SDM yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel kepadatan penduduk digunakan sebagai indikator bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah, maka akan membutuhkan fasilitas infrastruktur publik yang lebih tinggi.

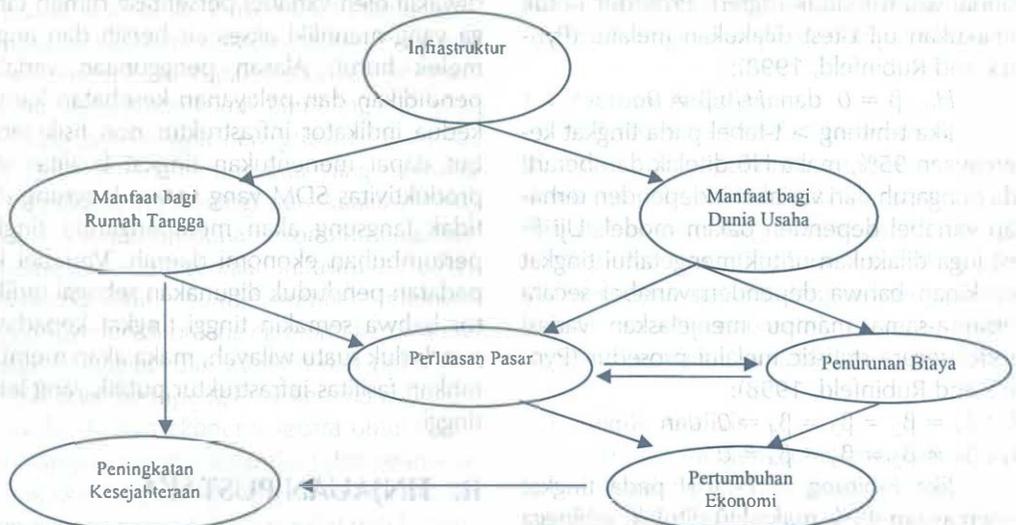
II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam *World Development Report 1994* World Bank yang berjudul *Infrastructure and Development* menjelaskan bahwa pengertian infrastruktur meliputi ketersediaan *core infrastructure* (infrastruktur inti) untuk memenuhi kebutuhan publik. Infrastruktur inti yang dimaksudkan adalah misalnya ket-

ersediaan fasilitas dan sarana transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan air bersih, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan energi. Dalam tataran praktis, infrastruktur seringkali dibedakan dalam dua kategori yaitu infrastruktur fisik (*hard infrastructure*) dan non fisik (*soft infrastructure*) bagi pemenuhan kebutuhan publik yang membantu keberlangsungan pembangunan. Infrastruktur fisik merupakan bentuk penyediaan fasilitas publik, sedangkan infrastruktur non fisik lebih diarahkan pada penyediaan fasilitas infrastruktur non fisik yang menunjang upaya peningkatan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan. Peranan infrastruktur menjadi sangat penting karena membuat manusia mampu untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan (Darja, et.al, 2004). Gambaran umum keterkaitan antara infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat berjalan melalui beberapa kondisi sebagaimana diilustrasikan oleh Proud'homme, 2004.

Gambar di atas menunjukkan bahwa

Gambar 1. Keterkaitan Infrastruktur dalam Pembangunan



penyediaan infrastruktur (fisik dan non fisik) dapat memberikan manfaat secara langsung kepada rumah tangga dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, sebenarnya sebagian besar manfaat ini lebih dirasakan oleh pihak pengusaha. Penelitian

Prud'homme (2004) di Perancis, menunjukkan bahwa perusahaan mengkonsumsi 2/3 dari total pelayanan infrastruktur, sehingga banyak biaya yang bisa diminimalkan dan yang utama adalah peluang pasar yang semakin luas (misalnya melalui telekomunikasi dan transportasi). Hal ini akan mengakibatkan peningkatan daya saing dan produksi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Briceno, et.al, 2004).

Kajian Kessides (1993) yang mempelajari secara luas bukti-bukti dampak infrastruktur dalam pembangunan ekonomi juga menggambarkan bagaimana infrastruktur memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan menyediakan pelayanan publik. Penelitian Demurger (2001) yang menggunakan data regional tingkat provinsi di China, juga menemukan bahwa lokasi geografis dan infrastruktur endowment tercatat secara signifikan menjelaskan perbedaan dari kinerja

pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi tersebut.

Berdasarkan kajian-kajian di atas, dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah sebuah isu jangka panjang yang menggambarkan pentingnya karakteristik konsep

pembangunan jangka panjang, sehingga keputusan dalam investasi infrastruktur membutuhkan adanya perspektif jangka panjang dari para pengambil keputusan (Akatsuka dan Yoshida, 1999). Sementara kebutuhan akan peningkatan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial sudah dipahami, tetapi di banyak negara berkembang pelayanan infrastruktur utama masih bermasalah karena keterbatasan dan buruknya kualitas infrastruktur yang ada (Briceno et.al, 2004). Masalah-masalah itu utamanya ada pada kawasan pedesaan di negara-negara berkembang, meski wilayah perkotaan juga tetap dalam tekanan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur karena tingginya perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Intinya bahwa infrastruktur hanyalah satu *tools* untuk meningkatkan pembangunan di suatu daerah yang merupakan prasyarat bagi pembangunan regional. Artinya, pembangunan infrastruktur tidak serta merta menjamin terciptanya pembangunan daerah yang optimal, tetapi hal ini akan menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah. Faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi lainnya harus tetap diperhatikan karena secara bersama-sama juga memiliki peranan penting bagi pembangunan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Perbandingan Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Tahun 2006

Indikator	Indonesia	Malaysia	Thailand	Vietnam
Pertumbuhan PDB (%)	5.05	7.23	6.17	7.69
Konsumsi energi listrik (kWh per kapita)	478.20	3165.52	1864.58	501.45
Konsumen telepon tetap dan selular (per 1.000 penduduk)	185.34	765.56	536.79	183.60
Immunisasi (% dari anak usia 12-23 bulan)	72.00	95.00	96.00	97.00
Fasilitas Sanitasi Urban (%)	73.00	95.00	98.00	92.00
Angka Melek Huruf (% penduduk usia 15 tahun keatas)	90.38	88.69	92.65	90.28
Jalan Aspal (% total jalan)	-	81.32	-	-

Sumber: World Development Indicators Database, 2007.

3.1. Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya peningkatan pembangunan meski hasilnya belum optimal mengingat kondisi infrastruktur di Indonesia relatif masih tertinggal dibanding dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa fasilitas infrastruktur di Indonesia relatif masih tertinggal dibanding beberapa negara ASEAN lainnya, baik dari indikator fasilitas kesehatan, ketersediaan air bersih bagi masyarakat maupun angka melek huruf.

Bank Dunia (2005) menyatakan permasalahan infrastruktur di Indonesia disebabkan tiga hal. Pertama, krisis ekonomi yang mengakibatkan kemampuan pembiayaan menjadi rendah; Kedua, buruknya kebijakan dan kelembagaan yang korup; dan Ketiga, faktor otonomi daerah yang tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas daerah dalam menyediakan dana pembangunan infrastruktur di daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan tipe investasi biaya tinggi dengan rate of re-

turn yang lama, terutama pembangunan infrastruktur non fisik. Oleh karena itu, infrastruktur non fisik lebih banyak diusahakan oleh pemerintah karena keterbatasan minat dari investor swasta di bidang ini.

Tabel 2. di atas menunjukkan adanya

non fisik akan direpresentasikan oleh tiga indikator; akses rumah tangga ke fasilitas air bersih, angka melek huruf dan kepadatan penduduk. Akses air bersih dan angka melek huruf merupakan indikasi ketersediaan infrastruktur non fisik. Kepadatan penduduk merupakan indi-

Tabel 2. Indikator Infrastruktur Non Fisik di Indonesia 2007

Wilayah-wilayah	% Rumah Tangga dengan akses air bersih	Angka Melek Huruf	Kepadatan Penduduk
Sumatera	62.25	95.19	96.78
Jawa	45.03	90.62	3,020.17
Bali and Nusa Tenggara	45.38	82.70	298.00
Kalimantan	55.73	93.49	31.25
Sulawesi	45.98	92.72	86.60
Maluku and Papua	47.61	88.98	20.33

Sumber: Statistik Indonesia, 2007.

ketimpangan dalam penyediaan fasilitas infrastruktur non fisik antar wilayah di Indonesia. Akses rumah tangga terhadap air bersih masih relatif rendah dengan rata-rata berada pada kisaran 50%. Hal ini menunjukkan kebutuhan sarana air bersih yang sangat penting bagi terjaganya kebutuhan dasar masyarakat masih sangat kurang. Akses terhadap air bersih merupakan salah satu faktor yang menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat. Keterbatasan sarana air bersih ini banyak disebabkan kondisi lingkungan yang semakin tidak mendukung pada penyerapan air yang lebih banyak. Angka melek huruf menunjukkan kondisi yang agak baik karena cukup merata di seluruh wilayah di Indonesia. Yang paling mencolok dari data di atas adalah tingkat kepadatan penduduk yang sangat timpang antara wilayah Jawa dengan luar Jawa. Ketimpangan kepadatan penduduk menyebabkan penyediaan infrastruktur di luar Jawa kurang mendapat perhatian. Dengan kondisi ini, maka daya tarik suatu wilayah menjadi menurun karena keterbatasan fasilitas infrastruktur.

3.2. Hasil Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menguji efek dari infrastruktur non fisik terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Infrastruktur

kasi tingkat populasi di wilayah tertentu yang berimplikasi pada tinggi rendahnya tuntutan ketersediaan infrastruktur bagi masyarakat.

Regresi berganda dipergunakan dalam mengestimasi pengaruh infrastruktur non fisik terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan data cross-section tahun 2007. Hasil analisis regresi terlihat dalam tabel berikut.

Sebagaimana terlihat dari tabel di atas, tidak terlihat adanya multikolinearitas karena nilai R² yang tidak tinggi dan terdapat banyak variabel yang signifikan secara statistik. Permasalahan heteroskedastisitas dapat diindikasikan dengan menggunakan White test untuk heteroskedastisitas (Pyndick and Rubinfeld, 1998). Hasil dari White test yang tidak signifikan secara statistik memperlihatkan tidak adanya indikasi kemungkinan adanya heteroskedastisitas dalam model (lihat lampiran 3 untuk hasil lengkapnya).

Hasil persamaan regresi dari tabel 3 dapat ditulis dalam bentuk persamaan regresi:

$$G = -33,70 - 2,44Yt + 1,02ASW + 14,08AMH + 0,91KPP \dots\dots\dots(3)$$

Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,53, menunjukkan bahwa 53 persen dari variasi variabel dependen dapat dijelaskan dengan variabel independent yang digunakan dalam

Tabel 3. Analisis Hasil Regresi**Variabel Dependen: G**

Variabel	Koefisien	Standard Error	t-Statistik	Probabilitas
C	-33.69857	26.40304	-1.276314	0.2136
LOG(Yt)	-2.436603	0.746850	-3.262505	0.0032*
LOG(ASW)	1.021767	1.695613	0.602595	0.5522**
LOG(AMH)	14.08017	5.752112	2.447827	0.0217*
LOG(KPP)	0.909609	0.250579	3.630026	0.0013*
R-squared	0.530983	F-statistik	7.075741	
Adjusted R-squared	0.455940	Prob.(F-statistik)	0.000593	
Durbin-Watson stat	1.255130			

Catatan:

* = Koefisien signifikan pada tingkat keyakinan 95%

** = Koefisien tidak signifikan pada tingkat keyakinan 95%

model. Nilai R² juga cukup realistis dengan memperhatikan bahwa masih banyak faktor ekonomi lain yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia. Nilai (F-test) juga signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Signifikansi dari nilai F mendukung model karena menunjukkan bahwa model ini cukup meyakinkan untuk menjelaskan variasi dari pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Berdasarkan hasil regresi maka dapat diketahui bahwa koefisien Yt secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Maksudnya adalah, nilai koefisien PDRB per kapita riil (Yt) yang negatif mengindikasikan bahwa provinsi dengan nilai PDRB tinggi cenderung untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat. Hal ini dimungkinkan karena pada wilayah dengan PDRB per kapita tinggi justru terlena dengan kondisi tersebut sehingga memberikan perhatian yang kurang terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Kemungkinan lain yang dapat menjelaskan adalah adanya daya tarik dari wilayah yang memiliki PDRB tinggi sehingga mendorong lebih banyak penduduk untuk bermigrasi ke daerah tersebut sedangkan nilai tambah aktivitas ekonomi tidak mampu mengimbangi keadaan tersebut.

Koefisien akses kepada air bersih (ASW) menunjukkan bahwa jika terdapat kenaikan sebesar 1 persen, maka mampu mendorong

peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,02 persen dari periode sebelumnya. Namun sayangnya, koefisien ini tidak signifikan secara statistik berdasarkan nilai t-hitung yang lebih kecil dari nilai t-tabel. Hal ini cukup mengejutkan karena kemudahan akses kepada air bersih sebenarnya mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpola hidup sehat mengingat pentingnya air bagi kehidupan sehari-hari. Tidak signifikannya variabel ini pada model di atas diduga karena model cross-section ini hanya mampu melihat fenomena dalam jangka pendek, sehingga mungkin saja manfaat ketersediaan air bersih baru dapat diketahui pada jangka panjang yang tidak tercakup dalam model ini.

Koefisien angka melek huruf (AMH) signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terdapat pertumbuhan 1 persen dari angka melek huruf maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 14,08 persen dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Tingginya koefisien AMH menunjukkan bahwa peranan pengembangan sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya angka melek huruf sangat memungkinkan bagi pengembangan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan perbaikan tingkat pendidikan maka akan mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam

mengadopsi ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi baru yang perkembangannya sangat cepat dari waktu ke waktu.

Kepadatan penduduk (KPP) juga memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dan koefisiennya signifikan pada tingkat kepercayaan hingga 95 persen. Apabila terdapat peningkatan kepadatan penduduk sebesar 1 persen maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,91 persen. Efek positif dari kepadatan penduduk bagi pertumbuhan ekonomi adalah sebuah informasi yang sangat penting bagi pengembangan kebijakan kependudukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia sekitar 60 persen terkonsentrasi di wilayah pulau Jawa dengan adanya daya tarik industri dan aktivitas ekonomi lainnya yang ada di pulau Jawa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang secara signifikan mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDRB riil per kapita pada provinsi-provinsi di Indonesia. Variabel tersebut adalah besarnya PDRB riil tahun sebelumnya, angka melek huruf, dan tingkat kepadatan penduduk. Sementara itu, variabel persentase akses rumah tangga terhadap air bersih secara statistik tidak signifikan dalam mempengaruhi perubahan pertumbuhan PDRB riil per kapita. Hal ini akan berdampak pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan fasilitas infrastruktur di seluruh wilayah, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya peningkatan daya saing ekonomi dan mengurangi kesenjangan fasilitas infrastruktur antar wilayah di Indonesia.

Meskipun hasil regresi menunjukkan adanya keterkaitan antara infrastruktur non fisik dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam jangka pendek, tetapi harus dipahami bahwa infrastruktur non fisik dengan segala fasilitasnya merupakan "complementary factor" untuk potensi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan eksis-

tensi dari sumber-sumber produktif (modal fisik ataupun modal manusia) untuk investasi dan inovasi dalam upaya merealisasikan pertumbuhan ekonomi.

4.2. Saran

Pemerintah hendaknya makin meningkatkan kemampuannya dalam penyediaan infrastruktur non fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang sangat diperlukan dalam pemberdayaan SDM. Untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran, upaya penyediaan fasilitas infrastruktur dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, lembaga-lembaga donor, dan pemerintah daerah, sehingga infrastruktur non fisik akan dapat menciptakan potensi pertumbuhan ekonomi didukung oleh kondisi yang kondusif.

Lebih lanjut, pemerintah sebaiknya secara bertahap memindahkan konsentrasi industri ke wilayah luar Jawa dengan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, dengan tujuan populasi penduduk tidak hanya terfokus di pulau Jawa tetapi tersebar merata di pulau-pulau lainnya melalui penyediaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi penunjang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akatsuka, Y., dan Yoshida, T., 1999. *Systems for Infrastructure Development; Japan's Experience*. Japan International Cooperation Publishing Co., Ltd., Tokyo.
- Briceno, C., Estache, A., dan Shafik, N., 2004. *Infrastructure Services In Developing Countries: Access, Quality, Costs and Policy Reform*, The World Bank.
- Canning, D., and Pedroni, P., 1999. *Infrastructure and Long Run Economic Growth*, paper, July.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Statistik Indonesia 2007*, BPS Indonesia, Jakarta.
- Darja, J., et. al., 2004. "The State of Village-Level Infrastructures and Public Services in Indonesia During the Economic Crisis", The SMERU Research Institute,

- Jakarta.
- de la Fuente, A. (2002), "Convergence Across Countries and Regions: Theory and Empirics," UFAE and IAE Working Papers 555.02, Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica (UAB) and Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC).
- Demurger, S., 2001. "Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?", *Journal of Comparative Economics*, Vol. 29, pp.95-117.
- Estache, A., 2004. "Emerging Infrastructure Policy Issues in Developing Countries: A Survey of the Recent Economic Literature", *Background Paper for the October 2004 Berlin meeting of the POVNET Infrastructure Working Group*, The World Bank.
- Hudson, W.R., Haas, R., dan Uddin, W. 1997. "Infrastructure Management: Integrating Design, Construction, Maintenance, Rehabilitation, and Renovation", McGraw-Hill, New York.
- Kessides, C., 1993. "The Contributions of Infrastructure to Economic Development – A Review of Experience and Policy Implications", *World Bank Discussion Papers No. 213*, World Bank, Washington D.C.
- Prud'homme, R., 2004. *Infrastructure and Development*, Washington DC, Paper prepared for the ABCDE (Annual Bank Conference on Development Economics), May 3-5.
- Pyndick, R.S., and Rubinfeld, D.L., 1998. *Econometric Models and Economic Forecasts*, Fourth Edition, Irwin, McGraw-Hill, USA.
- World Bank, 1994. "Infrastructure and Development", *The Annual World Development Report for 1994*, Washington DC.
- , 2005. *Indonesia: New Directions*, World Bank Brief for the Consultative Group on Indonesia, 19–20 January, Jakarta.
- , 2005. *World Development Indicators* 2005, World Bank, tersedia online di <http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport>, diakses, 18 Mei, 2009.

BIODATA PENULIS

Sorni Paskah Daeli, M.Si, lahir di Lahewa, Kabupaten Nias, tanggal 2 April 1972. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen tahun 2000 dan Sarjana Teknik Planologi tahun 2001 di Universitas Krisnadwipayana. Selanjutnya tahun 2005, meraih gelar Master Administrasi Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Sejak tahun 2000 menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat petani pemakai air (P3) pada proyek-proyek berbantuan World Bank dan Asian Development Bank (ADB). Sejak akhir 2007 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri sebagai peneliti. Selain sebagai PNS, saat ini menjadi dosen tetap pada Universitas Bina Darma Palembang, dan dosen tidak tetap pada Universitas Krisnadwipayana dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YAPPANN, Jakarta.

